Perlindungan Hukum Terhadap Istri dalam Perkawinan yang Tidak Dicatat Secara Hukum

Legal Protection of Wives in Marriages That Are Not Legally Recorded

Nuraeni

Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Kanwil Kemenkumham

E-mail: nuraeni.kanwilsultra@gmail.com

Oheo K. Haris

Pascasarjana Universitas Halu Oleo

E-mail: oheo.haris@uho.ac.id

Handrawan

Pascasarjana Universitas Halu Oleo

E-mail: handrawansaranani84@gmail.com

Deity Yuningsih

Pascasarjana Universitas Halu Oleo

E-mail: deity.yuningsih@yahoo.com

Abstract: *Unregistered marriages are unofficial marriages according to Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. The basis for the judge to apply Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code in the decision Number 146/Pid.Sus/2017/PN.Srl is to pay attention to the legal facts that such unregistered or unregistered marriages become legal changes, because although they are legal, they are nevertheless in the provisions of the state that the marriage does not have legal force, a legal act that does not have legal force cannot be recognized by the state as the basis for the right to take care of all interests related to the state (because it is not recorded in the state marriage administration). At the District Court in Decision Number 323/Pid.Sus/2016/PN.Gto, the panel of judges gave the opinion that the Defendant beat the victim who was a religiously legal wife but was not legally recorded. Therefore, the panel of judges gave the consideration that the element of household scope in the PKDRT law has been fulfilled. 2) Based on Article 10 a of the PKDRT Law, other than that the form of legal protection provided to wives as victims of domestic violence whose marriage is not legally recorded, namely the victim has the right to protection from family, police, prosecutors, courts, advocates, social institutions, or*

other parties either temporary or based on government stipulations protection from justice.

Keywords: Legal Protection; Unregistered marriages; Unofficial marriages.

Abstrak: Perkawinan yang tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak resmi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dasar hakim menerapkan Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN.Srl adalah dengan memperhatikan fakta-fakta hukum bahwa Perkawinan yang tidak resmi atau tidak tercatat tersebut menjadi problematik hukum, karena meskipun sah, akan tetapi dalam ketentuan negara perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, suatu perbuatan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum maka tidak dapat diakui oleh negara sebagai alas hak untuk mengurus segala kepentingan yang berkaitan dengan negara (karena tidak tercatat pada administrasi perkawinan negara) Namun berbeda halnya dengan pertimbangan hakim pada pengadilan Negeri pada Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2016/PN.Gto, Majelis hakim memberikan pendapat bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yang merupakan istri sah secara agama namun tidak di catatkan secara hukum. Oleh sebab itu, majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa unsur lingkup rumah tangga dalam undang-undang PKDRT telah terpenuhi. 2) Berdasarkan Pasal 10 a UU PKDRT, selain itu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada istri sebagai korban KDRT yang tidak tercatat pernikahannya secara hukum yaitu korban berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari keadilan.

Kata kunci: Perlindungan hukum; Perkawinan yang tidak tercatat; perkawinan yang tidak resmi

PENDAHULUAN

Pernikahan di bawah tangan atau biasa disebut pernikahan tidak di catat secara hukum sering kali dijadikan sebagai jalan pintas bagi laki-laki dengan hanya memperhatikan rukun dan syarat dalam Hukum Islam saja, tanpa memperhatikan persyaratan formal. Padahal peraturan perundang-undangan sudah sangat jelas mengaturnya sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Di dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 Bab X Pencatatan Nikah Pasal 26 Ayat (1) bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah.² Karena salah satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Hal ini tidak hanya berlaku bagi yang beragama Islam saja,

¹ Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan. Pasal 2.

² Bab X Pencatatan Nikah Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Pasal 26.

melainkan juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katolik, Hindu Maupun Budha. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk (penjelasan pasal 1) juga dalam Undang-Undang Perkawinan yang diperkuat dengan Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6.³ Akan tetap hingga kini masih banyak terjadi di Negara Indonesia, padahal sistem Hukum Indonesia tidak mengenal istilah, kawin tidak di catat secara hukum dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan.

Karena legalitas pasangan nikah tidak di catat secara hukum tidak dianggap sah oleh negara, maka dalam perjalanannya yang paling merasakan dampak ini adalah perempuan yang menikah tidak di catat secara hukum itu sendiri. Dampak negatifnya pun jauh lebih besar, terutama bagi pihak istri dan anak-anak hasil dari pernikahan tidak di catat secara hukum tersebut. Memang dari sudut pandang Agama sah, namun jika dipandang dari segi perlindungan hukum, secara sosiologis, tanggung jawab secara ekonomi serta pendidikan anak-anaknya masih perlu ditinjau ulang.⁴ Selain itu, apakah perempuan yang menikah tidak di catat secara hukum mempunyai hak yang sama dengan perempuan yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) ketika mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian hukum normatif khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami KDRT dalam perkawinan yang tidak dicatat secara hukum. Peter Mahmud Marzuki,⁵ menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai gambaran dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁶ Penelitian ini menekankan pada *ratio decidendi* Hakim dalam penerapan hukum perlindungan istri sebagai korban KDRT.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*)

³ Syukri Fathudin AW, Vita Fitria, "Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan", Jurnal Penelitian Humaniora, Volume 15, Issue 1, 2010, hlm. 7.

⁴ Tsuroya Kiswati, dkk, *Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur*. Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel. 2004., hlm. 9.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 35.

⁶ Yulianto Achmad, Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. hlm. 48.

dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu dengan menelusuri setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai putusan Hakim terhadap perkara anak. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) yaitu gabungan antara asas hukum dan doktrin para ahli hukum pidana yang digunakan untuk memahami konsep hukum pidana terkait perkawinan yang tidak dicatatkan secara hukum dan perlindungan hukumnya, sehingga diharapkan penormaan dalam aturan hukum dalam mengkaji serta menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis sesuai dengan tujuan penelitian ini. Pendekatan kasus (*Case approach*) yaitu dengan melihat kasus istri yang mengalami kekerasan rumah tangga tetapi pernikahannya tidak sah secara hukum karena tidak tercatat secara hukum.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

***Ratio Legis* Hakim Terhadap Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN. Srl.**

Hakim menerapkan Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam kasus putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN.Srl, dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan, yaitu:

1. Fakta Yuridis

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa MOHD. HERI BIN M. ZEN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati orang sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua primer Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut di hadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana. Karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dan hakim memperhatikan fakta-fakta hukum sehingga penerapan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terbukti. Selain hal itu tersebut bahwa dakwaan alternatif kedua disusun berbentuk subsidiaritas, sehingga hakim mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

2. Fakta Yuridis

Fakta persidangan dalam kasus ini yaitu:

a. Keterangan saksi

Dalam kasus ini saksi yang dihadapkan ada 5 (lima) yakni Siti Rukiah Binti Zainudin (Alm), Hermansyah Bin Zainudin (Alm), Malik Salahudin Bin Muchtar, Dani Purwanto alias Siwak bin M. Arpan, dan Amiati Binti Noto Wibowo (Alm).

b. Keterangan ahli

Menerangkan bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap korban/pasien a.n. NUR ASIAH Binti NURDIN tersebut kondisi korban yaitu korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia, adapun dengan ciri nadi sudah tidak teraba, tekanan darah tidak terukur, nafas sudah tidak ada lagi, dan pupil sudah melebar (dilatasi) maksimal. Berdasarkan hasil VER penyebab korban NUR ASIAH mengalami luka dikarenakan oleh trauma benda tumpul.

c. Keterangan terdakwa Yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana yang telah di paparkan di dalam kronologis kejadian. Yang mana terdakwa memang benar telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban Nur Asiah.

3. Fakta Sosiologis

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan meninggalnya NUR ASIAH Bin NAZARUDIN Hal-hal yang meringankan:
- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum Dari uraian di atas maka dapat dilihat bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi mendakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan: "Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun".

Namun, dalam surat dakwaan yang di buat oleh Jaksa Penuntut Umum ada tiga dakwaan yakni: Pertama, Jaksa menuntut dengan Pasal 44 Ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kedua (Primer), menuntut dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP mengenai penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Dan Ketiga (Subsider), menuntut dengan Pasal 351 ayat (1).

Dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum harusnya Hakim bisa lebih mempertimbangkan hukuman mana yang tepat dijatuhkan karena dari kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi ini korbannya sampai meninggal dunia. Apabila mengacu pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban maka ancaman yang dijatuhkan ialah selama-lamanya 7 tahun, sedangkan dalam UU PKDRT ancaman yang dijatuhkan terhadap terdakwa apabila terjadi kekerasan fisik yang mengakibatkan korban meninggal dunia ancaman pidananya ialah 15 (lima belas) Tahun.

Dalam hal ini kecenderungan hakim untuk tidak melakukan penemuan hukum kiranya sangat terlihat. Ketentuan Undang-Undang tidak dapat diterapkan begitu saja, secara langsung pada peristiwanya. Untuk dapat menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan abstrak sifatnya itu pada peristiwa yang konkret dan khusus sifatnya, ketentuan undang-undang itu harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan diarahkan atau disesuaikan dengan peristiwanya untuk kemudian baru diterapkan pada peristiwanya.⁷ Sejalan dengan hal tersebut, sejak hukum membuat tradisi untuk dituliskan (*written law*), maka pembacaan terhadap teks hukum menjadi masalah yang penting sekali. Sejak pembacaan teks menjadi penting, maka penafsiran terhadap teks hukum tak dapat dihindarkan.⁸

Di dalam Putusan ini pula Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Dalam tulisan ini penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim tersebut terlalu ringan mengingat korbannya telah meninggal dunia. Penulis berpendapat bahwa harusnya penjatuhan pidana yang tepat dijatuhkan pada terdakwa adalah dengan Undang-Undang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena ancaman pidana di dalam Undang-Undang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga setidaknya bisa memberikan efek jera kepada terdakwa mengingat korban telah meninggal dunia. Hal ini sejalan dengan Teori Pidanaan yaitu Teori Absolut (Pembalasan) yang mana pidana merupakan akibat mutlak

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan Keempat*, Yogyakarta: Liberty, 2008, hlm. 169.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006, hlm. 163.

yang ada sebagai suatu pembalasan atau tindak pidana yang dilakukan seseorang. Ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan.

Salah satu sifat yang melekat pada perundang-undangan atau hukum tertulis adalah sifat otoritatif dari rumusan-rumusan peraturannya. Namun demikian, pengutaraan dalam bentuk tulisan atau *litera scripta* itu sesungguhnya hanyalah bentuk saja dari usaha untuk menyampaikan sesuatu ide atau pikiran. Sehubungan dengan hal yang disebut belakangan ini orang pun suka menyebut tentang adanya semangat dari suatu peraturan.⁹ Sehingga sebenarnya hakim perlu menggali kembali semangat yang ada dalam UU PKDRT.

Di dalam kasus ini yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan menggunakan Pasal 351 Ayat (3) dikarenakan pernikahan antara terdakwa dan korban tidak tercatat atau dengan kata lain nikah sirih. Beberapa pertimbangan tersebut yakni:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Perumusan dakwaan berdasarkan atas hasil pemeriksaan dalam putusan 146/Pid.Sus/2017/PN.Srl, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Pertimbangan Fakta di Persidangan

Di dalam tulisan ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdapat kesesuaian antara keterangan terdakwa, keterangan saksi dan juga alat bukti yang terungkap di persidangan sehingga perkara tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan karena tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda, sehingga terhadap terdakwa pada perkara ini dapat dijatuhi pidana.

c. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan hakim ini terdiri atas dua hal yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Hal-hal yang memberatkan adalah merupakan sesuatu yang menjadi alasan sehingga

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 93.

sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa harus menimbulkan efek jera ataupun menambahkan pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa yang dikarenakan terdakwa tidak adanya alasan yang meringankan baginya. Sedangkan hal yang meringankan bagi terdakwa adalah setiap hal yang menjadi alasan bagi hakim agar sanksi yang didakwakan dikurangi oleh hakim dikarenakan pada diri terdakwa terdapat banyak hal yang meringankan bagi dirinya.

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan menggunakan pasal yang ada terdapat di dalam KUHP yakni pasal tentang penganiayaan yaitu pada Pasal 351 ayat (3) karena jika menurut hukum positif Indonesia pernikahan yang tidak tercatat apabila terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap terdakwanya tidak bisa di jerat dan dikenakan dengan pasal yang ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan tidak mendapat perlindungan hukum. Melihat kenyataan di atas maka sudah seharusnya patut dikaji kembali sistem peradilan pidana harus dilihat dari optik kepentingan yang lebih luas bukan saja hanya menekankan pada kepentingan tersangka atau terdakwa saja namun juga secara menyeluruh termasuk kepentingan korban tindak pidana.

Dari kasus pada tulisan ini dimana telah terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan kemudian oleh Hakim dijatuhkan dengan Pasal tentang Penganiayaan yakni Pasal 351 ayat (3). Hakim memilih aturan dalam KUHP, tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ketidakyakinan hakim pada terpenuhinya rumusan dalam aturan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, setidaknya memunculkan argumen bahwa teks undang-undang bukanlah ditafsirkan secara kaku.¹⁰

Sejalan dengan hal tersebut, kedudukan hakim sebagai pembentuk hukum ini berbeda dengan pembentuk undang-undang (legislator). Hakim melalui kuasa pembentukan hukumnya dapat diikuti oleh hakim yang lain.¹¹

¹⁰ M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi dan Relevansi", Undang Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 1 Nomor 1, 2018, hlm. 167.

¹¹ Budi Suhariyanto, "Eksistensi Pembentukan Hukum Oleh Hakim Dalam Dinamika Politik Legislasi Di Indonesia", Jurnal Rechtsvinding, Volume 4, Nomor 3, Desember 2015, hlm. 414.

Ratio Legis Hakim Terhadap Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2016/PN.Gto

Kronologi Perkara

Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul bagian bahu sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak satu kali. Kronologi kejadian, pada malam hari, saat itu korban berada di dapur sedang mencari makanan, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri korban sambil mengatakan “lagi *ngapain* kamu di dapur”, dan dijawab oleh korban dengan berkata “tunggu dulu lagi mencari makanan”. Selanjutnya Terdakwa memanggil korban untuk tidur. Terdakwa masuk ke dalam kamar dan korban ikut masuk. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa mengatakan kepada korban dengan berkata: “iya nanti sampai rumah saya mau bunuh kamu, biar saya masuk penjara”.

Karena merasa takut, korban lalu keluar dari kamar dan Terdakwa mengikuti korban sembari berusaha menarik rambut korban, tetapi Terdakwa tidak bisa menggapai rambut korban, kemudian korban berteriak meminta tolong. Saat itu korban melihat saksi Supono yang berada di gudang, berlari menghampiri saksi Supono untuk meminta pertolongan. Saksi Supono bertanya kepada korban dan Terdakwa, dengan berkata “kenapa kalian ini”, dan tiba-tiba Terdakwa’ memukul bagian bahu sebelah kanan korban dengan menggunakan kepala tangan kiri Terdakwa sebanyak satu kali yang mengakibatkan korban mengalami luka memar pada bagian bahu sebelah kanan korban, kemudian saksi Supono melerai pemukulan tersebut dan korban pulang ke rumah saksi Supono.

Penyebab Terdakwa memukul korban, karena saat itu Terdakwa menyuruh korban untuk mengambilkannya baterai, akan tetapi korban tidak mengambilkannya, sehingga Terdakwa saat itu marah dan memukul korban. Akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, korban mengalami luka memar pada bagian bahu sebelah kanan, sesuai dengan *visum et repertum* tertanggal 26 September 2016, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan pada punggung belakang sebelah kanan lima centimeter di bawah tulang belikat tiga belas centimeter dari garis pertengahan belakang terdapat luka lebam, berwarna keunguan, bentuk tidak beraturan dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter. Kesimpulan, terdapat tanda persentuhan dengan benda tumpul.

Terdakwa dan korban merupakan pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 4 orang anak dan 2 orang cucu. Antara Terdakwa dan korban memiliki hubungan suami-istri, tetapi mereka melangsungkan permakaman secara agama/siri, dan mereka tinggal serumah

selama beberapa tahun serta telah dikaruniai 4 orang anak, sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango.

Pertimbangan Majelis Hakim

Terhadap tuntutan pihak Jaksa, Majelis Hakim membuat pertimbangan hukum serta amar putusan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Unsur ‘Setiap Orang’;
 2. Unsur ‘Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga’.
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga);
- Menimbang, bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 UU RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
- Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga adalah: a. suami, istri, dan anak, b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada Huruf (a) karena hubungan darah, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dan orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU RI No.23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga);

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan satu sama lain, keterangan Terdakwa serta adanya bukti surat berupa *Visum Et Refertum*, terungkap bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2016, melakukan penganiayaan terhadap korban yang merupakan istri Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul bagian bahu sebelah kanan saksi dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak satu kali;
- Menimbang, bahwa kronologis kejadian pemukulan yang dialami oleh saksi korban yakni pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 malam hari, Terdakwa mengatakan kepada korban dengan berkata 'iya nanti sampai rumah saya mau bunuh kamu, biar saya masuk penjara'. Karena merasa takut, korban lalu keluar dari kamar dan Terdakwa mengikuti korban keluar dari kamar dan berusaha menarik rambut saksi korban, dan tiba-tiba Terdakwa memukul bagian bahu sebelah kanan korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa sebanyak satu kali, yang mengakibatkan korban mengalami luka memar pada bagian bahu sebelah kanan korban;
- Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, korban mengalami luka memar pada bagian bahu sebelah kanan, sesuai dengan *visum et repertum* nomor tanggal 26 September 2016, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan: Pada punggung belakang sebelah kanan lima centimeter. di bawah tulang belikat tiga belas centimeter dari garis pertengahan belakang terdapat luka lebam, berwarna keunguan, bentuk tidak beraturan dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter. Kesimpulan titik dua Terdapat tanda persentuhan dengan benda tumpul;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dan korban adalah merupakan ' pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak dan 2 orang cucu;
- "Menimbang, bahwa Terdakwa dan korban adalah merupakan pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak dan 2 orang cucu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi RUSMIN TANGAHU Alias MINI memiliki hubungan suami-istri tetapi mereka melangsungkan pernikahan secara agama/siri dan mereka tinggal serumah selama beberapa tahun serta telah dikaruniai 4 orang anak, sesuai dengan Surat Keterangan No. tanggal 28

Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Kepala Desa Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango;

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yang merupakan istri siri Terdakwa, meski korban bukan istri sah menurut Undang-Undang yaitu perkawinan mereka tidak dicatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan sipil, hanya menikah siri/secara agama, tetapi Terdakwa dan korban tinggal dalam satu rumah dalam jangka waktu yang lama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak serta 2 (dua) orang cucu, sehingga saksi korban dapatlah digolongkan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU RI No.23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ‘Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga’ telah terpenuhi;
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sedangkan dalam pemeriksaan tidak diketemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan pertanggung-jawaban pidana, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana selama 3 (Tiga) bulan penjara, sedangkan menurut Terdakwa dalam: permohonannya pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana ringan ringannya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap I paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar

kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan dan masyarakat, aspek kejiwaan 3 Terdakwa, aspek Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung-jawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

- Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban. hal tersebut telah menyebabkan penderitaan pada diri korban serta sifat perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pula dalam masyarakat;
- Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban, hal tersebut telah menyebabkan penderitaan pada diri korban serta sifat perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pula dalam masyarakat;
- Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;
- Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa dampak dan akibat negatif yang ditimbulkan, maka hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha yang bersifat edukatif,

konstruktif dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan lagi sebagai prevensi bagi masyarakat lain;

- Menimbang,” bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan SEMA No.1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaan Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya dan tanpa mengurangi juga penderitaan saksi korban yang harus menanggung penderitaan dalam perkara ini, sehingga Hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan Terdakwa dan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:
 1. Hal-hal yang memberatkan;
 2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi korban; Hal-hal yang meringankan:
 3. Terdakwa belum pernah dipidana;
 4. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 5. Terdakwa berterus-terang mengakui perbuatannya;
 6. Terdakwa dan korban sudah berdamai di depan persidangan;
 7. Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana, sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum;
- Menimbang, bahwa dengan bertitik-tolak dari aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan Terdakwa, aspek-aspek filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal

pemidanaan (*sentencing of disparity*), maka Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim Telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Analisis Putusan

Berbicara mengenai perkawinan, berarti berbicara mengenai masalah agama, agama dalam hal perkawinan sebagai lembaga yang menghalalkan hubungan sebagai suami istri, ada pun mengenai halal maka harus dikaitkan dengan adanya perkawinan yang sah, perkawinan yang harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, bagi yang beragama Islam, harus memenuhi syarat perkawinan; kedua belah pihak tidak mempunyai halangan perkawinan sebagai dimaksud dalam Al-Quran (surat An-nisa ayat 23) yang tidak boleh dinikahi karena ada hubungan muhrim, ada hubungan sesusuan, ada halangan perkawinan karena hubungan semenda seperti perempuannya masih terikat dengan perkawinan dengan lelaki lain (belum bercerai), tidak boleh memadukan dua bersaudara dalam waktu yang sama, kemudian dalam perkawinan harus antara lelaki dengan perempuan, ada akad nikah (ijab-kabul), ada wali nikah yang sah (wali nasab atau wali hakim), ada dua saksi nikah, ada mahar yang jelas (meski mahar ini ada ulama yang tidak memasukkan sebagai rukun), maka apabila hal tersebut berlangsung memenuhi syarat dan rukun tersebut maka, perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah menurut agama Islam dan hal tersebut diakui oleh Pasal 2 ayat (1) Perkawinan bahwa perkawinan sah jika dilaksanakan menurut ajaran.

Perkawinan yang sah sebagaimana yang diakui menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan tersebut, tidak dipandang resmi dan tidak diakui negara, apabila sebelum terjadinya perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (setempat). Dengan demikian, perkawinan yang tidak tercatat, atau perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri (dilakukan secara diam-diam) tidak diakui oleh negara. Pencatatan perkawinan (sebelum

perkawinan) dilakukan oleh negara bukan sekedar pencatatan saja, tetapi lebih dari pada itu yaitu petugas pencatat perkawinan melakukan penelitian awal rencana perkawinan, apakah tidak ada halangan syarat perkawinan menurut agama dan undang-undang, kalau ada maka dilakukan penolakan perkawinan mereka. Untuk itu dilakukan pengumuman 10 hari sebelum hari H perkawinan untuk menunggu keberatan pihak yang merasa dirugikan akibat rencana perkawinan tersebut.

Perkawinan yang tidak resmi atau tidak tercatat tersebut menjadi problematik hukum, karena meskipun sah, akan tetapi dalam ketentuan negara perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, suatu perbuatan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum maka tidak dapat diakui oleh negara sebagai alas hak untuk mengurus segala kepentingan yang berkaitan dengan negara (karena tidak tercatat pada administrasi perkawinan negara). seperti: Dasar untuk menerbitkan Akta Kelahiran Anak dan menunjuk ayahnya, dasar untuk mendapatkan bagian waris dari ayahnya, Dasar untuk mengurus status kewarisan harta peninggalan ayahnya baik bersumber dari harta peninggalan, hak properti, hak menerima gaji pensiun, simpanan pada bank dari ayahnya, hak dasar untuk pengalihan balik nama atas kekayaan syahnya, dan banyak hal yang lain yang membutuhkan data adanya perkawinan antara suami dan istri tersebut, dan anak hanya disandarkan pada ibunya saja. dan sebagai suami istri tidak mempunyai hubungan hukum untuk saling mewarisi apabila meminta bantuan penyelesaian perkara dari pemerintah.

Selanjutnya pada putusan hakim dapat diketahui dengan pasti melalui rujukan persoalan-persoalan yang ada dalam kenyataan sosialnya (termasuk fakta-fakta kompleks tentang apa yang dipercayai, diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat).

Jika dilihat dari beberapa putusan tersebut di atas, harusnya putusan No.146/Pid.Sus/2017/PN Sarolangun ini bisa juga dijatuhkan dengan Pasal 44 Ayat (3)¹² yang ada di Undang-Undang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena status perkawinan tidak tercatat jika terjadi perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan secara fisik, seksual, psikis atau penelantaran harusnya bisa dikenakan juga dengan pasal yang ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Namun berbeda halnya dengan pertimbangan hakim pada pengadilan Negeri pada Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2016/PN.Gto, Majelis hakim memberikan pendapat bahwa

¹² Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yang merupakan istri yang dinikahi tetapi tidak di catat secara hukum. Terdakwa, meskipun menikah secara sah secara agama sesuai Pasal 2 ayat (1) namun dalam hal ini korban bukan lah istri sah yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan sipil, hanya menikah siri/secara agama, tetapi Terdakwa dan korban tinggal dalam satu rumah dalam jangka waktu yang lama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak serta 2 (dua) orang cucu, sehingga saksi korban dapatlah digolongkan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

KESIMPULAN

Korban Kekerasan dalam rumah tangga yang menikah tetapi tidak dicatat secara hukum. walaupun bukan istri sah menurut Undang-Undang yaitu perkawinan mereka tidak dicatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan sipil, hanya menikah secara agama. Tetapi, Sepasang suami istri tersebut tinggal dalam satu rumah dalam jangka waktu yang lama dapatlah digolongkan ke dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU RI No.23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu perkawinan yang tidak dicatat pun adalah perkawinan yang sah sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, berdasarkan Pasal 10 a UU PKDRT, Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban KDRT adalah korban berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari keadilan.

Daftar Pustaka

Buku

- Achmad, Yulianto, Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Kiswati, Tsuroya, dkk, *Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daeah Tapal Kuda Jawa Timur*. Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel. 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan Keempat*, Yogyakarta: Liberty, 2008.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006.

_____, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Jurnal

Aulia, M. Zulfa, "*Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi dan Relevansi*", Undang Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 1 Nomor 1, 2018.

AW, Syukri Fathudin, Vita Fitria, "*Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*", Jurnal Penelitian Humaniora, Volume 15, Issue 1, 2010.

Suhariyanto, Budi, "*Eksistensi Pembentukan Hukum Oleh Hakim Dalam Dinamika Politik Legislasi Di Indonesia*", Jurnal Rechtsvinding, Volume 4, Nomor 3, Desember 2015.